

**PENGARUH ANGGARAN BERBASIS KINERJA DAN SISTEM PELAPORAN  
KEUANGAN TERHADAP AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH  
KABUPATEN BANDUNG**

***THE INFLUENCE OF PERFORMANCE – BASED BUDGETING AND FINANCIAL  
REPORTING SYSTEM TO THE ACCOUNTABILITY OF THE LOCAL  
GOVERNMENT’S PERFORMANCE ON BANDUNG REGENCY***

<sup>1</sup>Laura Wahdatul, <sup>2</sup>Sri Rahayu, <sup>3</sup>Vaya Juliana Dillak

<sup>1,2,3</sup>Prodi S1 Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Telkom

e-mail: <sup>1</sup>[wahdatullaura@gmail.com](mailto:wahdatullaura@gmail.com), <sup>2</sup>[srirahayu@telkomuniversity.ac.id](mailto:srirahayu@telkomuniversity.ac.id), <sup>3</sup>[vayadillak@telkomuniversity.ac.id](mailto:vayadillak@telkomuniversity.ac.id)

**Abstrak**

Anggaran tidak terserap merupakan kinerja yang buruk bagi instansi, disebabkan oleh penyusunan rencana strategik yang tidak berorientasi melakukan pengoptimalan pengeluaran. Salah satu cara untuk memantau dan mengendalikan kinerja atasan dalam mengimplementasikan anggaran yang telah ditetapkan, diperlukan sistem pelaporan keuangan yang baik.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa besar Anggaran Berbasis Kinerja, Sistem Pelaporan Keuangan, dan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Bandung serta mengetahui pengaruh Anggaran Berbasis Kinerja dan Sistem Pelaporan Keuangan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Bandung baik secara simultan maupun parsial.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian adalah kuesioner yang diuji melalui analisis deskriptif dan regresi linier berganda menggunakan aplikasi IBM SPSS 20.0. Jumlah populasi dalam penelitian ini sebanyak 28 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Se-Kabupaten Bandung. Dengan menggunakan *snowball sampling* diperoleh sampel sebanyak 140 karyawan bagian keuangan.

Berdasarkan hasil pengolahan data, dapat diketahui bahwa Anggaran Berbasis Kinerja dan Sistem Pelaporan Keuangan secara simultan maupun parsial berpengaruh positif signifikan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Bandung.

Berdasarkan hasil penelitian, maka untuk meningkatkan Anggaran Berbasis Kinerja, Sistem Pelaporan Keuangan dan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah perlu memaksimalkan pelaksanaan kinerja atas program atau kegiatan yang telah direncanakan dengan efektif dan efisien. Selain itu, Satuan Kerja Instansi Pemerintah (SKPD) dapat mempublikasikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) secara rutin dan berkala setiap periode ke publik.

**Kata kunci:** Anggaran Berbasis Kinerja; Sistem Pelaporan Keuangan; Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

**Abstract**

*Unabsorbed budget is a poor performance for institution, because determination of strategic planning is not perform optimization on oriented spending. One way to measure the performance control on budget implementation had defined, so it is necessary to make a good financial reporting system.*

*The purpose of this study is to determine how much Performance-Based Budgeting, Financial Reporting System and Institution Performance Accountability, as well as determine the influence of Performance-Based Budgeting and Financial Reporting System to the Accountability of the Local Government’s Performance on Bandung Regency either simultaneously or partially.*

*The data collection technique that used in this research is questionnaires which method descriptive analysis and multiple linear regression using by software IBM SPSS 20.0. The populations in this research were 28 work units (SKPD) Bandung Regency. By using snowball sampling, obtained sample of 140 people of finance department with snowball sampling technique.*

*The result showed that Performance-Based Budgeting and Financial Reporting System either simultaneously or partially have significant positive effect to Local Government’s Performance on Bandung Regency.*

*Based on this research, to increase Performance-Based Budgeting, Financial Reporting System, and Performance Accountability of Government Agencies, we should maximize the performance implementation of program or activities had planned with effective and efficient. In addition, work units (SKPD) should publish the Performance Accountability of Government report routinely and periodic every period to public.*

**Keywords:** *Performance-Based Budgeting; Financial Reporting System; Performance Accountability of Government Agencies.*

## 1. Pendahuluan

Anggaran Berbasis Kinerja yang baik oleh instansi pemerintah dan pengawasan yang optimal terhadap kualitas laporan keuangan instansi pemerintah diharapkan akan dapat memperbaiki akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sehingga kinerja penyelenggaraan urusan-urusan pemerintah dapat optimal. Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006<sup>[10]</sup> dan diubah lagi dengan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah<sup>[11]</sup>. Dalam peraturan ini, disebutkan tentang penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD). Adanya RKA-SKPD ini berarti telah terpenuhinya kebutuhan tentang anggaran berbasis kinerja dan akuntabilitas.

Menurut (Bastian, 2010 : 202)<sup>[4]</sup> bahwa Anggaran Berorientasi Kinerja (*Performance Budgeting*) merupakan sistem penganggaran yang berorientasi pada output organisasi dan berkaitan sangat erat dengan visi, misi dan rencana strategis organisasi. *Performance Budgeting* mengalokasikan sumber daya ke program, bukan ke unit organisasi semata dan memakai pengukuran output (*output measurement*) sebagai indikator kinerja organisasi. Dengan kata lain, *Performance Budgeting* adalah teknik penyusunan anggaran berdasarkan pertimbangan beban kerja (*work load*) dan biaya unit (*unit cost*) dari setiap kegiatan yang terstruktur.

Menurut Bastian (2010 : 297)<sup>[4]</sup> tujuan umum pelaporan keuangan sektor publik adalah memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja, dan arus kas suatu entitas yang berguna bagi sejumlah besar pemakai (*wide range users*) untuk membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya yang dipakai suatu entitas dalam aktivitasnya guna mencapai tujuan.

Berdasarkan Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) No.239/IX/6/8/2003<sup>[7]</sup> tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, menjelaskan bahwa akuntabilitas kinerja instansi pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kabupaten Bandung tahun 2014<sup>[8]</sup> menunjukkan bahwa akuntabilitas kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang ada di Kabupaten Bandung sudah sesuai dengan yang diharapkan karena indikator yang dibuat dalam Rencana Kerja memenuhi target sasaran yang diinginkan. Hal ini terlihat pada berita yang dilansir oleh (Bandung.Bisnis.com) bahwa Kinerja Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bandung patut dipertanyakan efektivitasnya. Pasalnya berdasarkan evaluasi pertanggungjawaban bupati selama 2014 menunjukkan Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (Silpa) mencapai Rp. 600 miliar dari total Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Rp. 3,7 triliun. Silpa tersebut menjadi yang terbesar dalam kurun sepuluh tahun terakhir. Anggota Panitia Khusus Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung 2014, Erwin Gunawan mengungkapkan sejumlah dinas yang mendapatkan alokasi anggaran banyak justru gagal menyerapnya dengan baik seperti Dinas Bina Marga, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Kesehatan, serta Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan. Padahal di Kabupaten Bandung banyak pelayanan publik yang membutuhkan sokongan dana.<sup>[1]</sup>

Sedangkan dilihat dari sistem pelaporan keuangan, Pemerintah Kabupaten Bandung (Pemkab Bandung) menerima opini disclaimer dari Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) tahun 2014 karena terjadi penyimpangan penggunaan anggaran. Hal ini ditunjukkan dalam berita yang dilansir oleh (inilahkoran.com) bahwasanya BPK RI dalam auditnya tidak memberikan opini (disclaimer) terhadap kinerja Pemkab Bandung karena terdapat penyimpangan dalam penggunaan anggaran, diantaranya Pemkab Bandung harus mengembalikan kerugian negara sebesar Rp 11 miliar untuk pembelian BBM di semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD), kecamatan dan truk-truk sampah. Selain itu, BPK RI juga menyoroti kesemrawutan pengelolaan manajemen aset Pemkab Bandung senilai Rp. 67 triliun. Kegagalan pengelolaan keuangan dan aset ini, kata Deni, cermin kegagalan birokrasi dalam menjalankan fungsinya, selain itu meminta inspektorat kembali dievaluasi, karena inspektorat yang bertugas sebagai *early morning* pengawasan Pemkab tidak berjalan dengan baik.<sup>[12]</sup>

Widiawati (2010)<sup>[9]</sup> telah meneliti Pengaruh Implementasi Penganggaran Berbasis Kinerja Terhadap Akuntabilitas Instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Sukabumi yang menunjukkan hasil bahwa implementasi penganggaran berbasis kinerja tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas Instansi Pemerintah daerah Kabupaten Sukabumi. Sedangkan menurut penelitian Yulianti (2014)<sup>[13]</sup> yang berjudul Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Kesulitan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi dan Sistem Pelaporan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Studi pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pelalawan) menunjukkan bahwa Sistem Pelaporan berpengaruh positif terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui Anggaran Berbasis Kinerja dan Sistem Pelaporan Keuangan berpengaruh secara parsial dan simultan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Bandung. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif yang menggunakan alat bantu kuesioner, populasi penelitian sebanyak 28 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Se-Kabupaten Bandung dengan jumlah sampel 140 karyawan bagian keuangan yang ada di pemerintah Kabupaten Bandung. Pengambilan sampel dilakukan menggunakan teknik *Snowball Sampling*.

## 2. Dasar Teori dan Metodologi

### Anggaran

Menurut Halim dan Kusufi (2014 : 191)<sup>[5]</sup> mengartikan anggaran sebagai dokumen yang berisi estimasi kinerja, baik berupa penerimaan dan pengeluaran, yang disajikan dalam ukuran moneter yang akan dicapai pada periode waktu tertentu dan menyertakan data masa lalu sebagai bentuk pengendalian dan penilaian kinerja

### Anggaran Berbasis Kinerja

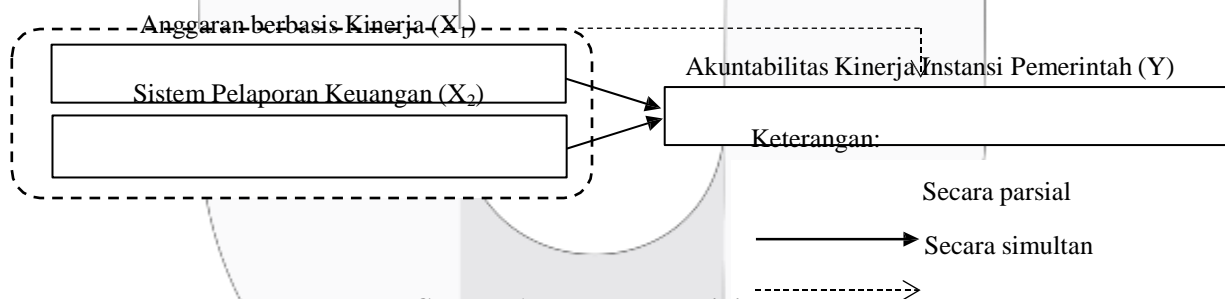
Menurut Halim dan Kusufi (2014 : 55)<sup>[5]</sup> Anggaran berbasis kinerja merupakan teknik penganggaran dalam sektor publik yang disusun untuk mengatasi berbagai kelemahan yang terdapat dalam anggaran tradisional, khususnya kelemahan yang disebabkan oleh adanya tolak ukur yang dapat digunakan untuk mengukur kinerja dalam pencapaian tujuan dan sasaran pelayanan publik. Anggaran pendekatan kinerja sangat menekankan pada konsep *value for money* dan pengawasan atas kinerja output. Pendekatan ini juga mengutamakan mekanisme penentuan yang pembuatan prioritas tujuan serta pendekatan yang sistematis dan rasional dalam pengambilan keputusan. Unsur-unsur pokok anggaran berbasis kinerja yang harus dipahami menurut Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK, 2008 : 14-19)<sup>[2]</sup> unsur-unsur anggaran berbasis kinerja yaitu Pengukuran kinerja, Penghargaan dan Hukuman, Kontrak Kinerja, Kontrol Eksternal dan Internal, serta Pertanggungjawaban Manajemen.

### Sistem Pelaporan Keuangan

Menurut Bastian (2010 : 297) tujuan umum pelaporan keuangan sektor publik adalah memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja, dan arus kas suatu entitas yang berguna bagi sejumlah besar pemakai (*wide range users*) untuk membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya yang dipakai suatu entitas dalam aktivitasnya guna mencapai tujuan. Adapun kriteria sistem pelaporan keuangan yang baik apabila Laporan Keuangan yang dibuat sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan Instansi Pemerintah menerbitkan laporan keuangan yang dijelaskan dalam persyaratan pelaporan keuangan organisasi sektor publik menurut Bastian (2010 : 298)<sup>[4]</sup>.

### Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Menurut Bastian (2010 : 88)<sup>[4]</sup> istilah Akuntabilitas berasal dari istilah bahasa Inggris *accountability* yang berarti pertanggungjawaban atau keadaan untuk dipertanggung jawabkan atau keadaan untuk diminta pertanggung jawaban. Akuntabilitas kinerja merupakan salah satu kata kunci bagi terwujudnya *good governance* dalam pengelolaan organisasi publik.



Gambar 1. Kerangka Pemikiran

### Metodologi

Populasi dalam penelitian ini adalah 28 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Se-Kabupaten Bandung yang dilakukan melalui penyebaran kuesioner. Teknik sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah *snowball sampling* dengan total sampel 140 orang yang terdiri atas kepala dinas, sekretaris, salah satu kepala bagian dan beberapa staf. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan analisis statistik deskriptif dan regresi linier berganda.

### 3. Pembahasan

Berdasarkan analisis statistik deskriptif berikut adalah hasil statistik deskriptif setiap variabel operasional.

Tabel 1. Hasil Statistik Deskriptif

Rata-Rata					
Variabel	SS	S	R	TS	STS
Anggaran Berbasis Kinerja	45	80	11	3	1
Sistem Pelaporan Keuangan	34	76	17	13	0
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	42	91	5	1	1

Sumber : Data Primer yang telah diolah SPSS 20.0 (2016)

Dari data tersebut dapat dilihat bahwa variabel Anggaran Berbasis Kinerja, Sistem Pelaporan Keuangan, dan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Bandung rata-rata mayoritas responden memilih setuju. Artinya setiap pernyataan yang ada dalam kuesioner sesuai dengan yang terjadi di lapangan.

Berdasarkan hasil uji validitas, seluruh pernyataan variabel Anggaran Berbasis Kinerja (X1), Sistem Pelaporan Keuangan (X2), dan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Y) dalam penelitian ini dinyatakan valid. Hasil  $r$  hitung yang diperoleh melebihi dari nilai  $r$  tabel yaitu sebesar 0.166 ini menunjukkan semua pertanyaan sudah valid. Kevalidan ini dapat dilihat dari  $[(sig.(2-tailed)] \leq$  nilai  $\alpha = 0.05$ . Sedangkan hasil uji reliabilitas variabel Anggaran Berbasis Kinerja (X1) nilai  $cronbach.s\ alpha$  adalah 0.746 > 0.60 yang berarti reliabilitas alat ukur dapat diterima. Untuk variabel Sistem Pelaporan Keuangan (X2) nilai  $cronbach.s\ alpha$  adalah 0.692 > 0.60 yang berarti reliabilitas alat ukur dapat diterima, dan variabel Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Y) nilai  $cronbach.s\ alpha$  adalah 0.854 > 0.60 yang berarti reliabilitas alat ukur dapat diterima. Dapat disimpulkan seluruh variabel dalam penelitian ini dinyatakan reliabel.

Adapun hasil pengujian asumsi klasik sebelum melakukan analisis regresi linier berganda sebagai berikut:

1. Hasil *output* uji normalitas terlihat bahwa nilai Asymp. Sig.(2-tailed) bernilai 0.441 > 0.05. Karena signifikansi untuk seluruh variabel lebih besar dari 0.05, artinya residual telah memenuhi asumsi distribusi normal.
2. Hasil *output* uji multikolinearitas terlihat bahwa nilai *Tolerance* kedua variabel sebesar 0.837 yang berarti > 0.1 dan VIF kedua variabel sebesar 1.195 yang berarti kurang dari 10.0, artinya tidak terjadi multikolinearitas antara variabel bebas.
3. Hasil *output* uji heteroskedastisitas dapat diketahui bahwa titik-titik tidak membentuk pola dan titik-titik menyebar baik diatas maupun dibawah angka 0 dari sumbu Y, artinya tidak terjadi heteroskedastisitas dalam model regresi ini.

Setelah melakukan uji asumsi klasik tersebut, selanjutnya dilakukan analisis regresi linier berganda. Tabel berikut ini adalah hasil ringkasan dari uji regresi linier berganda dalam penelitian ini.

Tabel 2. Regresi Linier Berganda

Variabel	Koefisien Regresi	thitung	Sig
Konstanta	7.748	3.769	0.000
Anggaran Berbasis Kinerja	0.601	12.370	0.000
Sistem Pelaporan Keuangan	-0.367	2.751	0.007
<b>Fhitung</b> = 112.349			
<b>R<sup>2</sup></b> = 0.621			

Sumber : Data Primer yang telah diolah SPSS 20.0 (2016)

### Koefisien Determinasi (R<sup>2</sup>)

Dari tabel 2, menunjukkan nilai *R Square* (R<sup>2</sup>) sebesar 0.621 artinya persentase sumbangan pengaruh variabel Anggaran Berbasis Kinerja dan Sistem Pelaporan Keuangan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebesar 62.1%, sedangkan sisanya sebesar 37.9% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini.

### Uji Parsial (Uji t)

Dari hasil uji pada tabel 2, hipotesis variabel (X<sub>1</sub>) terhadap variabel (Y) menunjukkan Anggaran Berbasis Kinerja memiliki  $t_{hitung} > t_{tabel}$  (12.370 > 1.9774) dan signifikan (0.000 < 0.05) yang membuktikan bahwa Anggaran Berbasis Kinerja berpengaruh positif terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Hipotesis variabel (X<sub>2</sub>) terhadap variabel (Y) menunjukkan Sistem Pelaporan Keuangan memiliki  $t_{hitung} > t_{tabel}$  (2.751 > 1.9774) dan signifikan (0.007 < 0.05) yang membuktikan bahwa Sistem Pelaporan Keuangan berpengaruh positif terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

### Uji Simultan (Uji F)

Berdasarkan hasil dalam tabel 2, menunjukkan hasil nilai Fhitung sebesar  $112.349 > F_{tabel} 3.0622$  dan nilai signifikansi ( $0.000 < 0.05$ ) yang artinya terdapat pengaruh yang positif antara variabel Anggaran Berbasis Kinerja dan Sistem Pelaporan Keuangan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah secara bersama-sama (simultan).

### Anggaran Berbasis Kinerja terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Bandung

Berdasarkan hasil pengujian secara parsial seperti yang ditunjukkan pada Tabel 2 diperoleh nilai  $t_{hitung} > t_{tabel}$  yaitu  $12.370 > 1.9774$  dengan tingkat signifikansi yaitu  $0.000 < 0.05$  sehingga  $H_0$  ditolak yang berarti secara parsial variabel Anggaran Berbasis Kinerja berpengaruh positif signifikan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Bandung, artinya semakin baik Anggaran Berbasis Kinerja semakin baik pula Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Bandung. Hal ini ditunjang pula oleh penjelasan dari hasil pengujian statistik deskriptif dimana rata-rata mayoritas responden sebesar 80 orang memilih setuju dengan skor rata-rata persentase mengenai tanggapan responden tentang Anggaran Berbasis Kinerja sebesar 83.56% (pada kategori baik), yang berarti Anggaran Berbasis Kinerja sudah dinilai baik oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Se-Kabupaten Bandung. Sedangkan pada skor rata-rata persentase mengenai tanggapan responden tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Bandung sebesar 85% (pada kategori sangat baik) dengan rata-rata mayoritas responden sebesar 91 orang memilih setuju, yang berarti Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Bandung sudah dinilai sangat baik oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Se-Kabupaten Bandung. Dapat disimpulkan bahwa adanya pengaruh signifikan dengan arah yang positif antara Anggaran Berbasis Kinerja terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Bandung. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang telah dilakukan Suriani (2014) bahwa Anggaran Berbasis Kinerja berpengaruh positif terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Bandung.

### Sistem Pelaporan Keuangan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Bandung

Berdasarkan hasil pengujian secara parsial seperti yang ditunjukkan pada Tabel 2 diperoleh nilai  $t_{hitung} > t_{tabel}$  yaitu  $2.751 > 1.9774$  dengan tingkat signifikansi yaitu  $0.007 < 0.05$  sehingga  $H_0$  ditolak yang berarti secara parsial variabel Sistem Pelaporan Keuangan berpengaruh signifikan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Bandung, artinya semakin baik Sistem Pelaporan Keuangan semakin baik pula Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Bandung. Hal ini ditunjang pula oleh penjelasan dari hasil pengujian statistik deskriptif dimana rata-rata mayoritas responden sebesar 76 orang memilih setuju dengan skor rata-rata persentase mengenai tanggapan responden tentang Sistem Pelaporan Keuangan sebesar 78.57% (pada kategori baik), yang berarti Sistem Pelaporan Keuangan sudah dinilai baik oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Se-Kabupaten Bandung. Sedangkan pada skor rata-rata persentase mengenai tanggapan responden tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Bandung sebesar 85% (pada kategori sangat baik) dengan rata-rata mayoritas responden sebesar 91 orang memilih setuju, yang berarti Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Bandung sudah dinilai sangat baik oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Se-Kabupaten Bandung. Dapat disimpulkan bahwa adanya pengaruh signifikan dengan arah yang positif antara Sistem Pelaporan Keuangan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Bandung. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang telah dilakukan Yulianti (2014) bahwa Sistem Pelaporan Keuangan berpengaruh positif terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Bandung.

### Anggaran Berbasis Kinerja dan Sistem Pelaporan Keuangan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Bandung

Berdasarkan hasil pengujian secara simultan seperti yang ditunjukkan pada Tabel 2 diperoleh nilai  $F_{hitung} > F_{tabel}$  yaitu  $112.349 > 3.0622$  dengan tingkat signifikansi yaitu  $0.000 < 0.05$  sehingga  $H_0$  ditolak yang berarti secara simultan variabel Anggaran Berbasis Kinerja dan Sistem Pelaporan Keuangan berpengaruh positif signifikan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Bandung, artinya semakin baik Anggaran Berbasis Kinerja dan Sistem Pelaporan Keuangan semakin baik pula Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Bandung. Hal ini ditunjang pula oleh penjelasan dari hasil pengujian statistik deskriptif yaitu rata-rata mayoritas responden sebesar 80 orang memilih setuju dengan skor rata-rata persentase mengenai tanggapan responden tentang Anggaran Berbasis Kinerja sebesar 83.56% (pada kategori baik), yang berarti Anggaran Berbasis Kinerja sudah dinilai baik oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Se-Kabupaten Bandung. Untuk skor rata-rata persentase mengenai tanggapan responden tentang Sistem Pelaporan Keuangan sebesar 78.57% (pada kategori baik) dengan rata-rata mayoritas responden sebesar 76 orang memilih setuju, yang berarti Sistem Pelaporan Keuangan sudah dinilai baik oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Se-Kabupaten Bandung. Sedangkan pada skor rata-rata persentase mengenai tanggapan responden tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Bandung sebesar 85% (pada kategori sangat baik) dengan rata-rata mayoritas responden sebesar 91 orang memilih setuju, yang berarti Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Bandung sudah dinilai sangat baik oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Se-

Kabupaten Bandung. Dapat disimpulkan bahwa Anggaran Berbasis Kinerja dan Sistem Pelaporan Keuangan secara simultan berpengaruh signifikan dengan arah yang positif terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Bandung. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang telah dilakukan Suriani (2014) bahwa Anggaran Berbasis Kinerja berpengaruh positif terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Bandung dan Yulianti (2014) bahwa Sistem Pelaporan Keuangan berpengaruh positif terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Bandung.

#### 4. Kesimpulan

Berdasarkan analisis regresi linier berganda, maka dapat disimpulkan sebagai berikut.

- a. Anggaran Berbasis Kinerja dan Sistem Pelaporan Keuangan secara bersama-sama berpengaruh positif signifikan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Bandung.
- b. Anggaran Berbasis Kinerja berpengaruh positif signifikan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Bandung.
- c. Sistem Pelaporan Keuangan berpengaruh positif signifikan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Bandung.

#### Daftar Pustaka:

- [1] Ardia, Herdia. (2015,08 Mei). Astaga! Silpa Kabupaten Bandung Tembus Rp. 4 Miliar. Bandung Bisnis [online], Tersedia: <http://www.bandung.bisnis.com> [25 November 2015].
- [2] Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK). (2008). Pengukuran Kinerja, Suatu Tinjauan pada Instansi Pemerintah. Jakarta.
- [3] Bandur, Agustinus. (2012). *Penelitian Kuantitatif Desain dan Analisis Data dengan SPSS*, Edisi 1. Yogyakarta:Deepublish.
- [4] Bastian, Indra. (2010). *Akuntansi Sektor Publik Suatu Pengantar*, Edisi 3. Jakarta:Erlangga.
- [5] Halim, Abdul dan Kusufi, Muhammad Syam. (2014). *Teori, Konsep, dan Aplikasi Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta:Salemba Empat.
- [6] IBM SPSS Statistic 20.0.
- [7] Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
- [8] LAKIP Kabupaten Bandung 2014. Diunduh dari [www.bandungkab.go.id](http://www.bandungkab.go.id) pada bulan November 2015.
- [9] Nina Widiawati. (2010). *Pengaruh Implementasi Penganggaran Berbasis Kinerja Terhadap Akuntabilitas Instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Sukabumi*. Tesis. UNPAD. Jawa Barat:tidak diterbitkan.
- [10] Peraturan Menteri Dalam Negeri No.13. (2006). Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Diunduh dari <http://hukum.unsrat.ac.id>.
- [11] Peraturan Menteri Dalam Negeri No.59. (2007). Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Diunduh dari <http://hukum.unsrat.ac.id>.
- [12] R Nugraha, Dani. (2014,08 Juni). FDA: Usut Kerugian Negara Rp. 11 M di Pemkab Bandung. Inilah koran [online], Tersedia: <http://www.inilahkoran.com> [25 November 2015].
- [13] Reni Yulianti. (2014). *Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Kesulitan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi dan Sistem Pelaporan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Studi Pada Satuan Kinerja Perangkat Daerah Kabupaten Pelalawan)*. JOM FEKON Vol.1 No.2. Pekanbaru:Universitas Riau.
- [14] Seri Suriani. (2014). *Pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Studi kasus di Wajo)*. *Information Management and Business Review*. ISSN 2220-3796 Vol. 7 No.4, 6-22. Makassar:Universitas Hasanuddin.